Komunikasi Mitigasi sebagai Langkah Strategis Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Banten

<https://doi.org/10.25008/wartaiski.v3i02.75>

Mary Lemona¹, Anita Yunia², Janette Maria Pinariya³

^{1,2,3}Fakultas Komunikasi, Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR

Jl K.H. Mas Mansyur Kav 35, Jakarta Pusat 12310 – Indonesia

*email korespondensi: mary.l@lspr.edu

Submitted: 16/11/2020, Revised: 21/12/2020, Accepted: 26/12/2020

Accredited by Kemristekdikti No. 30/E/KPT/2019

Abstract

This research aims to analyze the activities and components of BPBD Banten Province disaster mitigation communication strategies as a form of strategic steps for disaster risk reduction. The research method used is descriptive qualitative interpretive approach. Data collection was carried out through semi-structured interviews with BPBD Banten Province informants with a focus on disaster mitigation communication research according to Haddow & Haddow. The results showed that the socialization activities are still considered to be the right step to support the main program in educating the people of Banten Province. Traditional arts as a channels to socializing disaster awareness culture as well as theater facilities, mass media and social media as modern communication channels make a series of mitigation communication activities in BPBD Banten Province effective and efficient.

Keywords: Banten; disaster communication; communication channel; mitigation, risk reduction

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan dan komponen strategi komunikasi mitigasi bencana BPBD Provinsi Banten sebagai bentuk langkah strategis pengurangan risiko bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur kepada informan BPBD Provinsi Banten dengan fokus penelitian komunikasi mitigasi bencana menurut Haddow & Haddow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi masih dianggap menjadi langkah yang tepat untuk mendukung program utama dalam mengedukasi masyarakat Provinsi Banten. Kesenian tradisional sebagai alat sosialisasi budaya sadar bencana serta fasilitas teater, media massa dan media sosial sebagai saluran komunikasi modern membuat serangkaian kegiatan komunikasi mitigasi BPBD Provinsi Banten menjadi efektif dan efisien.

Kata Kunci: Banten; komunikasi bencana; saluran komunikasi; mitigasi; pengurangan risiko.

PENDAHULUAN

Kepulauan Indonesia yang terletak di antara gugus gunung api dan titik pertemuan lempeng bumi (*Pacific Ring of Fire*) serta kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis membuat Indonesia sering diterpa bencana alam (Toyudho, 2018). Pasal 1 Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana adalah “peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Bencana yang terus terjadi membuat dunia semakin terancam. Semakin banyak bencana yang terjadi, semakin banyak pula kebutuhan yang diperlukan untuk menanggulangi serta memperbaiki dampak

bencana. Sejak tahun 1950, kebutuhan perekonomian global terkait bencana alam naik 14 kali lipat. Hal ini menunjukkan bencana alam menjadi suatu hal yang sangat serius (Juneza & Purworni, 2016). Dalam kurun waktu 20 tahun, berbagai bencana terus terjadi, membuat Indonesia menempati posisi jumlah korban bencana kedua terbanyak di dunia, yaitu 160 ribu jiwa. Tahun 2018, peringkat jumlah korban bencana naik menjadi peringkat pertama (Setyawan, 2019).

Sepanjang tahun 2018, lebih dari lima bencana alam besar gempa bumi, tsunami, letusan gunung api serta fenomena likuifaksi tercatat sebagai bencana alam dengan jumlah korban dan kerusakan yang paling tinggi terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana gempa bumi sendiri telah menyebabkan 572 jiwa melayang. Bencana gempa bumi yang disusul tsunami hingga 14 Desember 2018 telah mengakibatkan 3.397 korban jiwa (Toyudho, 2018).

Pihak BNPB menyebutkan tingginya kerusakan dan korban bencana pada tahun 2018 di Indonesia diakibatkan oleh tiga peristiwa bencana. Pertama, gempa bumi beruntun di Nusa Tenggara Barat. Kedua, gempa bumi yang kemudian disusul tsunami dan pergeseran tanah atau likuifaksi di wilayah Sulawesi Tengah: Palu, dan Donggala. Ketiga, peristiwa tsunami di Selat Sunda yang diakibatkan oleh longsoran Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan gelombang air laut menerjang pesisir pantai Banten bagian barat dan sejumlah wilayah di Lampung Selatan (Safitri, 2018a).

Peristiwa di Selat Sunda seakan mengingatkan peristiwa letusan Gunung Krakatau tahun 1883 yang tercatat sebagai bencana terdahsyat dalam sejarah dunia (Pratama, 2018). Namun kronologi yang terjadi pada peristiwa di Selat Sunda tahun 2018 tidak ditandai oleh aktivitas tektonik yang menyebabkan masyarakat terlambat melakukan evakuasi. Naiknya gelombang air laut secara tiba-tiba menyebabkan 437 jiwa meninggal dunia, 16 hilang, 14.059 luka-luka dan 33.721 jiwa mengungsi (Safitri, 2018b).

Peristiwa tsunami ini membuat sejumlah pakar kegempaan dan bencana dunia khawatir. Di sisi lain, Jepang yang juga sering mengalami gempa bumi menyatakan negaranya belum dapat mendeteksi tsunami seperti halnya yang terjadi di Selat Sunda. Pakar gempa Universitas Southampton, Stephen Hicks (dalam Anwar, 2018) menyebutkan Indonesia telah memperlihatkan kepada banyak negara di dunia tentang kegiatan alam yang dapat menjadi pemicu terjadinya bencana alam.

Kepala Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Banten, Zaenal Arifin (dalam Deslatama, 2019) menyatakan bencana yang terjadi di Provinsi Banten itu perlu dievaluasi, terutama pada aspek komunikasi bencana. Kajian utama komunikasi bencana dalam buku BNPB (Nugroho & Sulistyorini, 2019) adalah bagaimana mengatur media atau saluran komunikasi sebagai salah satu elemen penting dalam penanggulangan bencana yang memiliki peran besar bagi setiap pemangku kepentingan untuk meminimalisir risiko bencana, terutama dalam fase mitigasi dan kesiapsiagaan.

Definisi mitigasi menurut Undang Undang No.24 tahun 2007 adalah “serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana”. Upaya mitigasi tidak hanya ada pada lingkup kebencanaan saja, melainkan sudah tersebar luas pada berbagai sektor, misalnya dalam dunia sepak bola. Dalam penelitian Junaedi dan Sukmono (2019) menyebutkan mitigasi bencana dalam pertandingan sepak bola sangat penting untuk keselamatan pemain maupun penonton dari dampak wabah atau kerusakan dalam pertandingan. Oleh karena itu, informasi maupun tindakan pencegahan perlu dilakukan.

Kompleksitas permasalahan bencana membuat berbagai pihak terus berupaya untuk melakukan penataan atau perencanaan dalam menanggulangi masalah bencana yang terjadi sehingga upaya yang dilakukan dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Kehadiran BNPB di tingkat nasional dan BPBD di tingkat daerah serta kepanjangan tangan pemerintah sebagai ujung tombak dan pelindung masyarakat dituntut untuk mempunyai rasa tanggungjawab dalam kepekaan menghadapi bencana (Sikumbang, Zainun dan Zubaidi, 2018).

Dengan adanya kegiatan komunikasi mitigasi bencana ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara kepentingan pemerintah guna menyadari masyarakat dalam mempersiapkan diri dan lingkungan apabila terjadi bencana. Dalam penelitian Roskusumah (2013) banyak sekali hal yang bisa diterapkan dari komunikasi mitigasi. Badan Geologi berkewajiban memberikan komunikasi bencana kepada masyarakat di sekitar gunung berapi dengan memperhatikan unsur adat dan kepercayaan lokal yang masih erat dianut oleh masyarakat, yakni sosialisasi dan simulasi bencana serta peningkatan optimalisasi peran juru kunci. Meskipun demikian, perkembangan arus teknologi dan informasi tetap

perlu diperhatikan.

Keeratan dan kedalaman hubungan antarmanusia dalam suatu komunitas masyarakat berubah menjadi lebih cair dan menipis dengan kehadiran media massa yang membawa pengaruh signifikan kepada setiap penggunanya. Apabila dulu komunikasi terjadi secara langsung dengan bertatap muka, kini hal tersebut berubah seiring munculnya jejaring sosial dalam internet sebagai media komunikasi modern. Dalam penelitian Pinariya, Lemona (2019) perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi pusat perhatian bagi masyarakat dengan proses interaksi dapat diwakilkan dalam koneksi media seperti *Facebook*, *Instagram*, *Youtube*, *Skype* dan lain-lain. Kebiasaan dalam penggunaan media baru ini mulai banyak diterapkan generasi milenial terutama kalangan *opinion leader* yang mana dianggap sebagai salah satu pemeran penting dalam mempengaruhi publik (Pinariya, Ikhsano & Sutjipto, 2020).

Pendekatan traditional maupun modern dalam penerapan komunikasi mitigasi bencana berperan penting sebagai saluran potensial untuk diskusi dan umpan balik masyarakat. Dengan kehadiran keduanya, pihak lembaga, organisasi, pemerintah, media, pelaku bisnis maupun masyarakat diharapkan dapat menentukan langkah strategis pengurangan risiko bencana yang efektif dan efisien (Ahmad et al., 2016, dalam Asteria, 2016).

KERANGKA TEORI

Bencana demi bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor nonalam terus terjadi di Indonesia, terutama gempa bumi dan tsunami. BNPB sebagai ujung tombang penanggulangan bencana melakukan pengamatan pemberitaan bencana di Indonesia menyimpulkan masalah penanggulangan bencana di lapangan terus menunjukkan problematika sebagaimana yang dikemukakan Budi (2011, dalam Budi, 2012), setelah melalui berbagai penguatan landasan hukum, kelembagaan dan pengalaman penanggulangan bencana masih terus mengalami persoalan baik secara konseptual maupun lapangan. Persoalan utama tersebut antara lain adalah “KKIK” (Komunikasi, Informasi, Koordinasi dan Kerjasama).

Studi Shklovski, Palen & Sutton (2008) menyebutkan masalah bencana dan krisis selalu tidak pasti dan terus mengalami perubahan yang dapat ditandai dengan minimnya informasi dan komunikasi atau bahkan justru informasi yang disampaikan sangat berlebihan, membuat situasi semakin kompleks. Studi Rudianto (2015) menyebutkan komunikasi bencana tidak hanya dibutuhkan dalam kondisi darurat saja, melainkan juga penting untuk dilakukan sebelum bencana terjadi atau yang dikenal dengan istilah mitigasi.

Penelitian Wardyaningrum (2014) menyebutkan mitigasi merupakan tindakan berkelanjutan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik terhadap harta benda maupun korban jiwa. Komunikasi mitigasi ini memiliki peran penting untuk menyinergikan kebijakan pemerintah dan program lembaga nonpemerintah yang terlibat dalam penanggulangan bencana (Lestari, Prabowo dan Wibawa, 2012). Contoh penerapan mitigasi salah satunya ada pada penelitian Rahman (2015) yang menganalisis mitigasi bencana langsung di Kabupaten Banjarnegara dilakukan dalam dua bentuk, yaitu mitigasi struktural dilakukan dengan melakukan penyusunan data base daerah potensi bahaya bencana dan pemasangan sistem peringatan dini. Sedangkan mitigasi nonstruktural dilakukan dengan menyajikan informasi, melakukan sosialisasi, dan pelatihan dan simulasi bencana.

Bentuk mitigasi nonstruktural lainnya juga disebutkan dalam penelitian Suwaryo dan Yowono (2017) yang dapat dilakukan dengan cara menjauhi lokasi bencana, salah satunya dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang sekaligus memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Konsep pemberdayaan masyarakat ini dikemukakan dalam studi Pramono dan Yusuf (2015) yang menyebutkan penanggulangan bencana saat ini telah mengalami perubahan cukup mendasar. Pemaknaan bencana secara konvensional dianggap sebagai sebuah kejadian yang tidak dapat dicegah, namun seiring jalannya waktu mengalami pergeseran makna yang menyebutkan bencana dapat diprediksi, sehingga muncul istilah upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Rentang waktu dan fokus bantuan yang awalnya hanya berorientasi secara fisik, teknis semata dan dilakukan pada saat tanggap darurat bencana, kini telah bergeser pada konsep penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Pemerintah melalui BNPB membuat strategi membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) yang tertuang dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 (Buchari, Santoso dan Marlina,

2017). Penelitian Maarif (2012) menyebutkan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat adalah modal dasar dalam membangun Destana. Tujuan pembentukan Destana adalah untuk menanamkan pemahaman masyarakat dalam mengenal potensi bencana di suatu wilayah dengan memahami risiko bencana. Hasil kajian risiko dijadikan panduan untuk menyusun rencana program mitigasi agar masyarakat tangguh terhadap bencana. Hal ini dilakukan melalui tahapan: penyusunan peta ancaman, mengidentifikasi fasilitas masyarakat, menentukan jalur evakuasi serta strategi dan taktik perihal teknis lainnya (Oktari, 2019).

Untuk menyampaikannya kepada khalayak, studi Yuniar (2018) menyebutkan komunikasi harus efektif, dilakukan dengan pertemuan tatap muka di suatu forum, didukung internet, dan dapat mengakses media massa maupun media sosial yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan Desember 2019-April 2020 di Provinsi Banten. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Lindlof dan Taylor (dalam West & Turner, 2002) menjelaskan penelitian kualitatif tepat digunakan untuk pendekatan interpretatif, di mana peneliti ingin meninjau aksi sosial melalui kegiatan lapangan atau observasi dalam memperoleh pemahaman dan interpretasi mengenai cara pandang individu menciptakan dunia sosial (Neuman, 2011).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur kepada beberapa informan BPBD Provinsi Banten dengan fokus penelitian tentang komunikasi mitigasi bencana menurut Haddow & Haddow (2014) yang terdiri dari elemen kegiatan dan komponen strategi komunikasi mitigasi bencana. Sebagai sumber pendukung, peneliti melakukan pengkajian data melalui studi kepustakaan seperti buku, artikel jurnal, artikel berita maupun dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Proses teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan studi Miles and Huberman (1994) yang terdiri dari *data reduction*, *data display*, *conclusion drawing* dan *verification*. Setelah teknik analisis data dilakukan, peneliti menguji kredibilitas data melalui triangulasi. Konsep triangulasi ini diartikan sebagai teknik pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu yang dilakukan peneliti. Pengujian kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber, di mana pengumpulan data dilakukan dengan cara mendeskripsikan serta mengategorisasikan pandangan beberapa sumber yang nantinya akan menghasilkan suatu kesepakatan (Sugiyono, 2016).

HASIL PENELITIAN

Hasil evaluasi pasca tsunami Selat Sunda, berbagai peristiwa gempa bumi yang terjadi secara beruntun serta bencana lainnya mendorong Presiden dan BNPB memberikan instruksi kepada BPBD Provinsi Banten, khususnya pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk meningkatkan upaya mitigasi, terutama kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai dengan melibatkan seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat, relawan, dunia usaha hingga beberapa tokoh penting lainnya, seperti: Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kapolsek, TNI, Polri dan Babinsa.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, BPBD Provinsi Banten berupaya fokus untuk melakukan berbagai langkah kegiatan mitigasi yang mengacu pada peraturan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Salah satu strategi untuk mewujudkan hal ini dilakukan melalui pengembangan Destana dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Proses pengelolaan risiko bencana melibatkan secara aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya (Peraturan Kepala BNPB No.1 Tahun 2012).

Pada 11 Juli hingga 16 Agustus 2019, BNPB bekerjasama dengan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait menggelar kegiatan Ekspedisi Destana. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dukungan BNPB kepada daerah dalam rangka penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami serta pengembangan Destana yang berada di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa dengan melibatkan lima unsur Pentahelix, yakni: Pemerintah, Akademisi, Masyarakat, Lembaga Usaha dan Media. Setiap segmen wilayah target melibatkan sekitar 200 peserta, yakni 80 peserta dari unsur pusat, 75 peserta dari unsur provinsi dan 45 peserta dari unsur Kabupaten/Kota.

BNPB menargetkan tidak kurang dari 584 desa dan kelurahan, termasuk 300 sekolah yang terbentang di lima provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat dan Banten. Mulai tahun 2016 baru terbentuk 34 Destana di seluruh Kabupaten/Kota, yang seharusnya jumlah tersebut merupakan target untuk setiap Kabupaten/Kota. Keterbatasan anggaran yang dari pusat maupun daerah menjadi salah satu penyebab minimnya pembentukan program tersebut.

Meskipun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat bagi BPBD Provinsi Banten untuk terus menentukan langkah-langkah strategis pengurangan risiko bencana. Maksud dan tujuan pembentukan Destana ini antara lain adalah untuk meningkatkan status kemampuan masyarakat, relawan, karang taruna dan lainnya dalam menanggulangi bencana yang lebih cepat, efektif dan efisien serta dapat memberikan acuan pelaksanaan kegiatan mitigasi bagi para pemangku kepentingan.

Dalam program Destana, masyarakat yang sudah dibentuk akan diberikan pelatihan-pelatihan khusus seperti cara melakukan evakuasi mandiri, memasang tenda, memasak hingga cara menggunakan alat komunikasi. Diseminasi informasi dan komunikasi bencana sebagai bagian dari pelayanan kehumasan merupakan faktor penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Humas BNPB dalam kegiatan Bimbingan Teknis Kehumasan yang berlangsung 27-29 Juli 2016 meminta setiap perwakilan daerah mampu mengomunikasikan pernyataan terkait bencana di daerahnya. Perwakilan BPBD Provinsi Banten mengungkapkan bahwa kehumasan selama ini berada di Sekretariat Kabupaten, yang berarti belum ada struktur khusus yang dibentuk terkait hal tersebut. Saat ini, unsur mitigasi bencana dipegang oleh bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan langkah pengurangan risiko bencana hanya dilakukan dan disajikan oleh bidang tersebut.

Hal ini tentu tidak menjadi penghalang BPBD Provinsi Banten. Adanya kolaborasi dan kerjasama antarpemangku kepentingan membuat serangkaian kegiatan mitigasi menjadi terarah dan terpadu. Upaya utama yang saat ini dikembangkan oleh BPBD Provinsi Banten untuk mendukung program Destana ini yakni sosialisasi. Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi ini dilakukan dengan memetakan wilayah rawan bencana, misalnya Desa X rawan banjir, Desa Y rawan gempa dan Desa Z rawan longsor. Bentuk pemetaan ini dilakukan agar konteks pesan komunikasi bencana dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terhadap potensi bencana yang terjadi di wilayahnya. Meskipun demikian, edukasi mengenai potensi bencana lainnya tetap perlu dilakukan.

Dalam kegiatan sosialisasinya, BPBD Provinsi Banten menemukan kendala internal maupun eksternal. BPBD Provinsi Banten menilai kesadaran masyarakat terhadap bencana masih sangat minim. Banyak masyarakat yang beranggapan bencana merupakan takdir Tuhan, sehingga hal yang dapat dilakukan apabila terjadi bencana yakni pasrah kepada Sang Pencipta. Akibatnya, masyarakat *cuek*, tidak peduli terhadap pesan-pesan sosialisasi yang disampaikan. Sedangkan dari sisi internal, BPBD Provinsi Banten mengakui kegiatan sosialisasi masih dilakukan secara umum, belum ada kegiatan sosialisasi khusus yang dilakukan untuk tiap target usia, misalnya untuk lansia maupun penyandang disabilitas.

Meskipun demikian, kegiatan sosialisasi masih dianggap langkah yang tepat untuk mengedukasi masyarakat. Maka dari itu, hal yang dilakukan BPBD Provinsi Banten dalam menentukan langkah strategis pengurangan risiko bencana yang efektif dan efisien adalah dengan melibatkan kerjasama pemangku kepentingan serta memanfaatkan alat dan sarana komunikasi secara pro-aktif yang dapat mendukung kegiatan sosialisasi yang dapat diterima seluruh lapisan masyarakat.

Sosialisasi Bencana Melalui Media Komunikasi Tradisional. Salah satu pihak yang terlibat kolaborasi dan kerjasama BPBD Provinsi Banten dalam kegiatan sosialisasi adalah BNPB. Peristiwa tsunami Selat Sunda yang termasuk ke dalam kategori bencana lingkup nasional, membuat BNPB ikut terlibat di dalamnya. Kehadiran BNPB sebagai Lembaga Non Kementerian yang mempunyai tugas melakukan penanggulangan bencana diharapkan dapat mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Artinya, pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana harus melibatkan seluruh daerah di bawahnya.

Salah satu bentuk sinergi ini dilakukan dengan menggelar kegiatan sosialisasi dan edukasi budaya sadar bencana melalui kesenian tradisional, yaitu pagelaran Wayang Golek. Wayang Golek merupakan salah satu ragam kesenian wayang hasil pengembangan Wayang Kulit. Wayang Golek pertama kali diperkenalkan Sunan Kudus di daerah Kudus, Cirebon, Parahyangan hingga wilayah Banten. Kehadiran Wayang Golek sebagai media kesenian tradisional ini dianggap efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana yang kerap melanda wilayah Banten

(Poerwanto, 2019).

Gambar 1. BNPB Sosialisasi Bencana melalui Pagelaran Wayang Golek di Pandeglang
Sumber: Achdami & Samodro, 2019

Tidak hanya mengedukasi, program ini didesain sekaligus untuk membangun komunikasi tradisional Indonesia serta menjadi sarana hiburan masyarakat Banten, khususnya Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan data BNPB, Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu wilayah yang memiliki dampak dan kerusakan yang paling tinggi akibat peristiwa tsunami di Selat Sunda beberapa waktu lalu serta memiliki potensi bencana alam lainnya seperti banjir, gempa bumi, kekeringan, puting beliung, longsor dan lain-lain.

Konteks pesan potensi bencana disampaikan oleh dalang Opick Sunandar Sunarya dari Mekar Arum 2 Giriharja di sela pertunjukan menggunakan unsur komunikasi verbal, yakni bahasa daerah Sunda serta objek (Wayang Golek), tanda-tanda (rambu-rambu bencana), suara (alat musik tradisional) dan gerakan-gerakan Wayang yang menunjukkan unsur komunikasi nonverbal. Hal menarik dari komunikasi nonverbal ialah Studi Albert Mahrabian (1971 dalam Natalina, 2017). Menurutnya, tingkat kepercayaan seseorang tujuh persen berasal dari bahasa verbal, 38 persen suara, dan 55 persen ekspresi muka.

Albert Mahrabian juga menambahkan apabila terjadi pertentangan antara apa yang diucapkan seseorang dengan perbuatannya, maka orang lainnya cenderung lebih mempercayai hal-hal yang bersifat nonverbal. Meskipun demikian, dua unsur komunikasi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dalam arti keduanya bekerja bersamaan untuk menciptakan suatu arti atau makna.

Teater sebagai Saluran Komunikasi Berbasis Teknologi. Kehadiran teknologi telah membawa BPBD Provinsi Banten dapat mengembangkan sosialisasi atau penyuluhan menjadi modern. Semenjak terjadi peristiwa tsunami di Selat Sunda, BPBD Provinsi Banten bersama pemangku kepentingan terkait mencari alternatif baru agar kegiatan sosialisasi tidak hanya dapat dilakukan secara verbal dan nonverbal, melainkan dapat didukung dengan visualisasi dan audio yang membuat kegiatan sosialisasi menjadi terpadu.

Salah satu alternatif ini dilakukan dengan membangun fasilitas teater bencana yang diresmikan tahun 2019 di BPBD Provinsi Banten. Fasilitas ini ditargetkan untuk pelajar dan mahasiswa. Penggunaan teater biasanya dilakukan berdasarkan arahan dari pemerintah maupun instansi pendidikan itu sendiri. Fasilitas ini dilengkapi sekitar 40 kapasitas kursi dan satu layar lebar serta audio dengan kualitas terbaik.

Gambar 2. Fasilitas Teater BPBD Provinsi Banten
Sumber: Primer, 2019

BPBD Provinsi Banten serta pemangku kepentingan lainnya menilai bahwa fasilitas teater ini merupakan media komunikasi yang inovatif. Sama halnya seperti sosialisasi yang dilakukan melalui Wayang Golek, fasilitas teater bencana ini juga sifatnya tidak hanya mengedukasi, melainkan dapat menjadi sarana hiburan anak-anak yang dimana konteks pesan disajikan dalam bentuk perfilman atau dokumenter, seperti misalnya film bencana Gunung Krakatau, Gempa dan Tsunami di Aceh serta bencana alam lainnya yang dikemas demikian rupa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang asal-usul bencana terjadi serta cara memperbaiki dampak yang ditimbulkan dengan harapan masyarakat dapat lebih tangguh terhadap suatu bencana.

Media Massa sebagai Saluran Komunikasi Aktual. Salah satu peran media massa saat ini adalah mempengaruhi perubahan perilaku maupun mental bagi penggunanya. Gerbner (dalam Rahmat, 2005, dalam Istiyanto, 2013) menyebut media massa merupakan kepercayaan masyarakat industri. Mengapa demikian? Karena hampir semua isi pesan yang ditampilkan dijadikan sebagai *trend* dan anutan baru bagi masyarakat. Hal ini tentu berbeda dengan dua atau tiga dekade sebelumnya di mana kehidupan masyarakat masih sangat bergantung pada komunikasi antarpribadi.

Kehadiran media massa seperti televisi, radio, media cetak telah menjadikan perubahan sikap dan persepsi masyarakat dalam menyikapi sesuatu, salah satunya tentang kebencanaan. Saat ini, hampir semua organisasi maupun lembaga kebencanaan memanfaatkan media massa sebagai ruang komunikasi kepada publik. BPBD Provinsi Banten sejak tahun 2017 telah bekerjasama dengan berbagai media televisi dan radio lokal yang dapat menjangkau ke wilayah pelosok Provinsi Banten seperti Jawapostv Banten, Wartalika TV, ANTV Banten, Banten TV, BSTV, Kompas TV, dan Matahari TV.

[[...untuk sosialisasi melalui media massa, sejak tahun 2017-2018 kita kerja sama dengan radio lokal dan televisi lokal yang terjangkau ke pelosok-pelosok wilayah provinsi Banten. Hal-hal yang disosialisasikan seperti tindakan apa saja yang perlu dilakukan apabila terjadi bencana” (Rainan, Seksi Pencegahan BPBD Provinsi Banten)]].

Seiring berjalannya waktu, media massa yang sebelumnya hanya dapat diakses melalui TV dan radio, kini telah bergeser ke era digital. Banyak perusahaan media massa yang telah menduplikasi medianya baik secara konvensional maupun online. Sejak tahun 2017, media online di Provinsi Banten telah memiliki organisasi sendiri yang bergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Organisasi ini memiliki kepengurusan di beberapa provinsi di Indonesia. Ini merupakan sebuah peluang bagi BPBD Provinsi Banten untuk dapat berkoordinasi perihal informasi dan komunikasi kebencanaan di Provinsi Banten dengan harapan dapat dijangkau secara nasional oleh seluruh lapisan masyarakat.

Media massa baik konvensional maupun online dinilai efektif sebagai medium pendukung kegiatan edukasi kepada masyarakat, seperti informasi mengenai pemetaan wilayah rawan bencana, meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, mempertimbangkan potensi bencana serta memahami sumber bencana yang terjadi. BPBD Provinsi Banten menyebutkan media massa memiliki tanggung jawab untuk meluruskan dan menyajikan informasi berupa data dan fakta untuk menghindari rumor yang berkembang.

Para pengambil keputusan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pakar bencana alam, pelaku bisnis, media maupun masyarakat berharap kehadiran media massa sebagai media komunikasi organisasi BPBD Provinsi Banten dapat mendukung langkah pengurangan risiko bencana sebagai prioritas pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.

Media Sosial sebagai Saluran Komunikasi Berbasis Internet. Dalam penelitian Istiyanto (2013) menyebutkan masyarakat secara langsung membutuhkan sebuah media komunikasi yang mampu menyalurkan partisipasinya. Akan tetapi kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh media massa karena pihaknya sudah memiliki target keuntungan yang telah dicanangkan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat menyadari kehadiran media baru menjadi jawabannya.

Masyarakat yang kini hidup di era teknologi baru merupakan masyarakat yang terbuka. Abrar (dalam Mahaswari, 2012) berpendapat masyarakat ini akan membawa nilai-nilai inovatif untuk menggeser nilai-nilai lamanya. Kehadiran teknologi dan informasi telah membawa masyarakat untuk

beralih ke cara-cara baru dalam mendukung sebuah gerakan sosial di masyarakat. Salah satu perubahan inidilakukan dalam gerakan kebencanaan.

Tak terlepas dari fungsi dan peran media massa, kini BPBD Provinsi Banten juga telah memberikan peluang baru bagi masyarakat untuk menerima dan menelaah informasi dan edukasi kebencanaan melalui *platform* media sosialnya seperti *Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube*.

Informasi yang disajikan berupa pengetahuan tentang bencana seperti definisi, ciri-ciri, pencegahan serta dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana, perkiraan cuaca, kegiatan dan aktivitas yang dilakukan rutin seperti upacara siaga apel, rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan serta data dan informasi terupdate tentang bencana yang terjadi di suatu wilayah.

Penggunaan media sosial sebagai media berjaring internet ini sudah dilakukan BPBD Provinsi Banten sejak 2014. Namun, sampai saat ini yang aktif digunakan dalam menyebarkan data dan informasi hanya Twitter dan Instagram. Hal ini membuat pemanfaatan media sosial BPBD Provinsi Banten tergolong pasif dibandingkan dengan BPBD tingkat daerah di bawahnya, sehingga wadah partisipasi masyarakat yang disajikan belum mumpuni.

Meskipun demikian, BPBD Provinsi Banten menyatakan penggunaan media sosial merupakan sarana edukasi masyarakat yang terpadu. Penggunaan media sosial sudah banyak digunakan hampir semua golongan masyarakat di Banten, sehingga data dan informasi yang disajikan dapat terdistribusi dengan baik dan cepat, berbeda dengan sosialisasi atau penyuluhan keliling yang memerlukan waktu yang cukup lama agar pesan yang disampaikan dapat diterima masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan dan strategi komunikasi yang dilakukan BPBD Provinsi Banten sebagai pendukung program utama dalam upaya pengurangan risiko bencana adalah sosialisasi. Kegiatan sosialisasi hingga dulu sampai saat ini masih dianggap sebagai langkah yang tepat untuk mengedukasi masyarakat untuk tangguh dan mengerti terhadap kemungkinan potensi bencana yang terjadi di wilayahnya. Kehadiran Destana sebagai program utama BPBD hingga kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara tradisional maupun modern berperan penting sebagai saluran potensial untuk diskusi dan umpan balik masyarakat. Meskipun BPBD Provinsi Banten belum memiliki struktur khusus yang bertanggung jawab pada kegiatan komunikasi, namun adanya kolaborasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan tidak menjadi halangan baginya untuk membuat serangkaian kegiatan mitigasi menjadi terarah dan terpadu.

Saat ini, kegiatan sosialisasi pengurangan risiko bencana di Provinsi Banten khususnya pada wilayah terpencil masih sangat bergantung pada nilai-nilai tradisional. Meskipun demikian, banyak masyarakat yang kini telah terbawa arus teknologi dengan membawa nilai-nilai inovatif untuk mendukung partisipasinya tentang kebencanaan pada media modern. Adanya fasilitas teater, media massa, serta media sosial ini sangat membantu BPBD Provinsi Banten untuk dapat mengembangkan dan menyesuaikan kegiatan edukasinya kepada masyarakat di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, G. (2006). *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Berto, A.R. (2018). The Capitalization of Backpacking Tourism Culture in Indonesian Films , *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana*
- Achdami, M. (2019). BNPB Sosialisasikan Sadar Bencana Lewat Wayang Golek. Diperoleh dari <http://www.harnas.co/2019/10/06/bnpb-sosialisasikan-sadar-bencana-lewat-wayang-golek>
- Anwar, M.C. (2018). Tsunami Selat Sunda Telah Memicu Keraguan Dunia Terhadap RI. Diperoleh dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181230194842-4-48483/tsunami-selat-sunda-telah-memicu-keraguan-dunia-terhadap-ri>
- Asteria, D. (2016). Optimalisasi Komunikasi Bencana di Media Massa Sebagai Pendukung Manajemen Bencana. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 3
- Buchari, A., Santoso, M.B., & Marlina, N. (2017). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Garut (Studi Kasus di Desa Pasawahan Kecamatan Tarongong Kaler). *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 3 (1), 49-62
- Budi, S. (2012). Komunikasi Bencana: Aspek Sistem (Koordinasi, Informasi dan Kerjasama). *Jurnal Aspikom*, 1 (4), 363-372
- Deslatama, Y. (2019). Pemda Banten Dinilai Kurang Wawasan Mitigasi Bencana. Diperoleh dari

- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181230194842-4-48483/tsunami-selat-sunda-telah-memicu-keraguan-dunia-terhadap-ri>
- Haddow, G.D., Haddow, K.S. (2014). *Disaster Communications In A Changing Media World*. USA: British Library Cataloguing in Publication Data
- Junaedi, F., Sukmono, F.G. (2019). Disaster Mitigation Information in Football Matches: Fans Perspective. *Jurnal Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 2 (2), 124-132
- Juneza, R.R., Purworini, D. (2016). Respon para Disabilitas terhadap Komunikasi Krisis BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Tim SAR Klaten Tahun 2016. *Jurnal Komunikasi Profetik*, 10(1), 81 <https://doi.org/10.14421/pjk.v9i1.1192>
- Lestari, P., Prabowo, A., & Wibawa, A. (2012). Manajemen Komunikasi Bencana Merapi 2010 pada saat Tanggap Darurat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10 (2), 173-197
- Maarif, S., Damayanti, F., Suryanti, E.D., & Wicaksono, A.P. (2012). Initiation of the Desa Tangguh Bencana Through Stimulus – Response Method. *Indonesian Journal of Geography*. 44 (2), 173-182
- Mahaswari, M. (2012). Jalin Merapi: Penggunaan Media Baru dan Gerakan Sosial Penanggulangan Bencana. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 1(2), 68 <https://doi.org/10.7454/jki.v1i2.7821>
- Miles, M. B. dan Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis, Second Edition*. USA: Sage Publications
- Natalina, D. (2017). *Komunikasi dalam PAUD*. Tasikmalaya, Indonesia: Ksatria Siliwangi
- Neuman, W., L. (2011). *Metodelogi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (7th ed.) (Terjemahan)*. Jakarta, Indonesia: PT Indeks.
- Nugroho, S.P, Sulistyorini, D. (2019). Komunikasi Bencana Membedah Relasi BNPB dengan Media. Jakarta, Indonesia: Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB
- Oktari, R.S. (2019). Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (2), 189-197
- Pramono, S., Yusuf, M. (2015). Implementasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (Studi Pengembangan Penanggulangan Bencana Desa Tangguh di Desa Boboh Kecamatan Menganti). *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan dan Praktik Administrasi*, 12(1), 37-150
- Pratama, A.N. (2018) Saat Gunung Krakatau Sebabkan Tragedi Bencana Besar dalam Sejarah. Diperoleh dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/24/15555231/saat-gunung-krakatau-sebabkan-tragedi-bencana-besar-dalam-sejarah?page=all>
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) No. 1 Tahun 2012 tentang Peroman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
- Poerwanto, E. (2019). Wayang Golek, Media Edukasi Sadar Bencana Paling Efektif. Diperoleh dari <https://bisniswisata.co.id/wayang-golek-media-edukasi-sadar-bencana-paling-efektif/>
- Rahman, A.Z. (2015). Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 1 (1), 1-14
- Pinariya, J.M., Ikhsano, A., Sutjipto, A.M. (2020). Accelerating Diffusion Innovation Using Celebrities as Opinion Leader Millenials: HPV Vaccines in Indonesia. *Malaysian Journal of Communication*, 36 (3), 32-48
- Pinariya, J.M., Lemona, M. (2019). Literasi dan Sosialisasi Internet Ramah Anak. *Jurnal Abdi Moestopo*, 2(2), 50-56.
- Roskusumah, T. (2013). Komunikasi Mitigasi Bencana oleh Badan Geologi KESDM di Gunung Api Merapi Prov. D.I. Yogyakarta. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(1), 60
- Safitri, E. (2018a). BNPB Catat Ada 3 Fenomena Langka di Tahun 2018. Diperoleh dari <https://news.detik.com/berita/d-4366023/bnpb-catat-ada-3-fenomena-langka-di-tahun-2018>
- Safitri, E. (2018b). Update Jumlah Korban Tsunami Selat Sunda: 473 Orang Tewas, 14.095 Luka. Diperoleh dari <https://news.detik.com/berita/d-4365690/update-jumlah-korban-tsunami-selat-sunda-437-orang-tewas-14059-luka>
- Samodro, D. (2019). BNPB Sosialisasikan Budaya Sadar Bencana Lewat Wayang Golek. Diperoleh dari https://kalim.antaranews.com/nasional/berita/1098852/bnpb-sosialisasikan-budaya-sadar-bencana-lewat-wayanggolek?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews
- Setyawan, F.A. (2019) BNPB Sebut Indonesia Nomor Wahid Jumlah Korban Bencana 2018. Diperoleh dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190801143833-20-417449/bnpb-sebut>

- indonesia-nomor- wahid-jumlah-korban-bencana-2018
- Sikumbang, A.T., Zainun., Zubaidi. (2018). Perencanaan Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Dalam Mengurangi Risiko. *Junal Komunikasi AT-BALAGH*, 2(1), 104
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: Alfabeta
- Suwaryo, P.A., & Yuwono, P. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Alam Tanah Longsor. *The 6th University Research Colloquium*, ISSN 2407- 9189, 305-314
- Shklovski, I., Palen, L., Sutton, J. (2008). Finding Community Through Information and Communication Technology in Disaster Response
- Toyudho, E.S. (2018). Deretan Bencana Alam Mematikan yang Menerjang Indonesia Sepanjang 2018. Diperoleh dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah46691586>
- West, R., & Turner, L., H. (2008) *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi (B. Marswendy, Terjemahan)*. Jakarta, Indonesia: Penerbit Salemba.
- Wardyaningrum, D. (2014). Perubahan Komunikasi Masyarakat dalam Inovasi Mitigasi Bencana di Wilayah Rawan Bencana Gunung Merapi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(3), 194
- Wujudkan Masyarakat Tangguh Bencana, BNPB Akan Gelar Ekspedisi Destana Tsunami. (2019). Diperoleh dari <https://orari.or.id/index.php/2019/07/09/wujudkan-masyarakat-tangguh-bencana-bnpb-akan-gelar-ekspedisi-destana-tsunami/>
- Yuniar. (2018). Analisis Informasi Mitigasi Bencana Gunung Sinabung dalam Pespektif Komunikasi Publik di Kabupaten Karo. *Jurnal Kapita Selektu Geografi*, 1 (1), 1-6